

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 3 SAMARINDA

Yashinta Nursasabila, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Samarinda.

Pengarang : Yashinta Nursalsabila

NIM : 2102016016

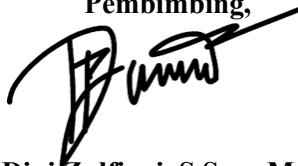
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 21 November 2025

Pembimbing,



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si.
NIP 197810192006042003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 867-881

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 3 SAMARINDA

Yashinta Nursalsabila ¹, Dini Zulfiani ²

Abstrak

Tujuan penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi guru yang ada di SMK Negeri 3 Samarinda dalam implementasi Kurikulum Merdeka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada aspek pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keberlangsungan proses pengembangan kompetensi guru tersebut. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer yang bersumber dari key informan yaitu Wakil Kepala bidang Kurikulum SMK Negeri 3 Samarinda dan 3 (tiga) informan guru yang mewakili tiap jenjang kelas, yakni kelas X (sepuluh), XI (sebelas), XII (dua belas) di SMK Negeri 3 Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru di SMK Negeri 3 Samarinda dilaksanakan melalui metode pelatihan dan workshop, pendampingan dan mentoring dalam program SMK PK, kolaborasi dan jaringan dengan pihak industri, pemodelan Sekolah Penggerak SMK PK, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, pemantauan sepanjang proses pembelajaran, serta penerimaan umpan balik dan penelitian tindakan di kelas. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan kompetensi ini meliputi jadwal pelatihan yang bertabrakan dengan jadwal mengajar di kelas, adanya pemangkasan dana dari pemerintah, serta keharusan pihak sekolah untuk menganggarkan sendiri untuk melaksanakan pelatihan.

Kata Kunci : *Kompetensi Guru, Kurikulum Merdeka, Pengembangan Kompetensi Guru, Sumber Daya Manusia*

Pendahuluan

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (19) yang menyatakan bahwa Kurikulum merupakan serangkaian rancangan kegiatan serta pengaturan perihal tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta prosedur yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nursalsabilay@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pembelajaran untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum Merdeka melalui persiapan kurikulum yang dilaksanakan pada tahun 2020, kemudian diluncurkan pada tahun 2021 melalui penerapan secara bertahap yang kemudian dievaluasi, sampai akhirnya diterbitkan secara nasional melalui kanal *Youtube* Kemendikbud RI pada Rabu, 27 Maret 2024. Dalam penerapan awalnya, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, tercatat bahwa terdapat lebih dari 300.000 sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Di Samarinda sendiri penerapan Kurikulum Merdeka dikutip dari Kemendikbud (2023) tercatat sudah terdapat sebanyak 386. Implementasi Kurikulum Merdeka yang terjadi di lapangan, ditemukan berbagai permasalahan terkait kompetensi guru.

Permasalahan kualitas kompetensi sumber daya manusia guru juga menjadi fokus permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda ini terdapat tidak hanya kekurangan kuantitas tetapi juga terdapat pada kualitas guru yang rendah. Hal ini dilaporkan pada berita Norwahliyah (2024) yang mengutip pernyataan dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Ibu Sri Puji Astuti, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan SDM merupakan kunci utama yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Samarinda. Peningkatan pendidikan tersebut tidak dilaksanakan dengan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, kurikulum, dan regulasi saja, namun juga pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia para pengajar. Di SMK Negeri 3 Samarinda sendiri, ditemukan adanya kekurangan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ditemukan bahwa belum semua guru memiliki kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang memadai. Terdapat sekitar 30% dari guru yang masih minim dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini bertentangan dengan tuntutan yang diberikan oleh kurikulum merdeka yang mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif dan lebih bervariasi dalam mengajar.

Minimnya kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknologi yang diterima oleh para guru. Pengembangan kompetensi guru ini juga harus didukung dengan alokasi pendanaan yang cukup. Alokasi pendanaan yang terbatas dapat menimbulkan kesulitan bagi guru untuk mendapatkan pelatihan secara intensif, baik dalam aspek pelatihan teknologi maupun pembelajaran yang sesuai dengan alur Kurikulum Merdeka.

Proses pelatihan dan pengembangan kompetensi guru kemudian dapat mengalami kendala lainnya, seperti terbatasnya dana alokasi. Keterbatasan dana ini menghambat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru. Seperti yang terjadi di SMK Negeri 3 Samarinda, dimana guru-guru mengalami imbas pemangkasan dana dari pemerintah yang mengharuskan pihak sekolah untuk mengadakan workshop mandiri atau pelatihan kompetensi mandiri dengan biaya pribadi yang dipungut dari masing-masing guru. Permasalahan ini mengakibatkan

berkurangnya partisipasi guru dalam keikutsertaan pelatihan kompetensi. Padahal, sebelumnya pelaksanaan pelatihan difasilitasi oleh pemerintah, namun saat ini terjadi adanya efisiensi atau pemangkasan dana yang mengurangi dukungan tersebut. Akibatnya, pengembangan kompetensi menjadi tidak merata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Soro et al. (2024) keterbatasan anggaran menyebabkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi sangat terbatas. Pengaruh keterbatasan dana pendukung pengembangan dan pelatihan kompetensi guru ini menjadi hal yang krusial dikarenakan dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka juga memberikan beberapa beban lain seperti kompleksitas dalam penyusunan modul pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk merancang dan menyusun proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, kebebasan ini dapat mengakibatkan beban baru bagi guru terutama apabila harus menyusun modul ajar yang berdiferensiatif dan kreatif dalam jangka waktu yang terbatas. Hambatan ini selain hanya membutuhkan kompetensi yang mumpuni, namun juga kesiapan mental dan profesionalisme yang baik. Indarti (2023) mengatakan bahwa perencanaan yang terdapat dalam modul pembelajaran dapat menentukan hasil dari materi yang disampaikan kepada para siswa, apabila guru tidak merencanakan modul pembelajaran dengan baik maka pembelajaran nantinya akan tersampaikan secara tidak teratur. Tantangan implementasi kurikulum merdeka tidak hanya dari beban guru dalam penyusunan modul ajar saja, tetapi juga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran kurikulum merdeka menuntut guru untuk memiliki keterampilan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajarannya harus melibatkan gaya pembelajaran yang menarik. Pada kenyataan di lapangan dalam pelaksanaannya di SMK Negeri 3 Samarinda ini dilaksanakan melalui beberapa metode yaitu melalui, proses menganalisis siswa untuk mengetahui seberapa jauh kephahaman awal siswa-siswa tersebut terhadap suatu materi ataupun mata pelajaran yang akan dilaksanakan kedepannya. Pembelajaran kemudian dilakukan dengan pemanfaatan media konten berupa audio dan visual, serta penghasilan produk akhir dari pembelajaran.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia menurut Seto et al. (2022) adalah teknik mengelola hubungan dan peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif serta dapat difungsikan secara optimal guna mencapai tujuan perusahaan, para tenaga kerja, serta masyarakat sekitar secara optimal.

Sebagai salah satu unsur sumber daya yang memiliki peran paling besar, manajemen sumber daya manusia tidak dapat dihindarkan dari kegiatan apapun.

Termasuk dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Flippo (1981) (dalam Seto et al. (2022) menjelaskan fungsi manajemen sumber daya manusia menjadi 2 jenis fungsi yaitu:

- 1) Fungsi manajerial, merupakan fungsi yang harus terlaksanakan agar pelaksanaan organisasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut Santika (2020) fungsi manajerial pelaksanaan manajemen sumber daya manusia merujuk kepada pelaksanaan pekerjaan yang memanfaatkan fungsi pikiran atau mental. Adapun yang termasuk kepada fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia adalah: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
- 2) Fungsi Operasional, menurut Santika (2020) fungsi operasional pelaksanaan manajemen sumber daya manusia merupakan pelaksanaan fungsi teknis yang memerlukan aktivitas pengelolaan sumber daya manusia secara fisik. Adapun fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia adalah sebagai: pengadaan sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, disiplin Kerja, dan pemberhentian.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Subjek Manajemen Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidik merupakan keseluruhan tenaga profesional yang memiliki tugas dalam perencanaan serta pelaksanaan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil tugas pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (bagi pendidik ditingkat perguruan tinggi). Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang terqualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan keseluruhan pegawai dalam bidang pendidikan yang memiliki tugas dalam pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan.

Kompetensi Pendidik

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menjelaskan kompetensi merupakan serangkaian pemahaman, kemampuan, serta perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru maupun dosen dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 10 ayat (1) menjelaskan kompetensi guru meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik

Menurut Alfath et al., (2022) kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi yang dimiliki guru dalam mengelola proses belajar mengajar pada murid.

2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Alfath et al., (2022) kompetensi kepribadian meliputi sikap guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti kemandirian, kestabilan, kedewasaan, wibawa, serta akhlak mulia yang dimiliki oleh guru.

3. *Kompetensi Sosial*

Alfath et al., (2022) mengatakan bahwa kompetensi sosial menyangkut kepada kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar termasuk kepada para murid.

4. *Kompetensi Profesional*

Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pengajaran oleh guru, indikator spesial dari kompetensi profesional ini terdiri atas: penguasaan esensi keilmuan yang berhubungan dengan bidang studi, serta penguasaan struktur dan metode keilmuan.

Pengembangan Kompetensi Guru dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal disebutkan bahwa pengembangan kompetensi guru disebut juga pengembangan profesi. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada Pasal disebutkan bahwa pengembangan profesi guru meliputi peningkatan pada ke-empat fondasi utama dalam profesi guru, yaitu pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pengembangan profesi dari ke-empat unsur kompetensi ini merupakan fondasi esensial yang wajib dimiliki dan terus ditingkatkan oleh setiap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal.

Pawartani & Suciptaningsih (2024) menyebutkan 7 (tujuh) model pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

1. Pelatihan dan *Workshop*

Menurut Wahira (2023) (dalam Pawartani & Suciptaningsih, 2024), pelatihan Kurikulum Merdeka memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi guru. Hal ini dikarenakan melalui pelatihan guru dapat lebih memahami terkait materi serta implementasi Kurikulum Merdeka itu sendiri.

2. Pendampingan dan Mentoring

Menurut Pawartani & Suciptaningsih (2024) pelaksanaan pendampingan dan mentoring merupakan bentuk interaksi ini kemudian yang membantu guru untuk memahami tantangan yang dihadapi, serta mendorong adanya refleksi terhadap praktik mengajar mereka dengan memperoleh pengalaman dan memiliki pemahaman baru dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas.

3. Kolaborasi dan Jaringan

Pawartani & Suciptaningsih (2024) mengatakan bahwa kolaborasi dan jaringan antara guru dalam suatu bidang dapat meningkatkan kompetensi guru. Hal ini dikarenakan melalui kolaborasi antara guru dapat terjadi interaksi saling berbagi ide dalam pelaksanaan pembelajaran bagi guru.

4. Pemodelan Sekolah Penggerak

Kemendikbudristek (2021) mengatakan bahwa Sekolah Penggerak merupakan usaha untuk memuwudkan visi Pendidikan Indonesia untuk mencapai

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terbentuknya Pelajar Pancasila dimulai dari sumber daya manusia yang unggul yaitu kepala sekolah serta para guru. Rahayu et al. (2022) mengatakan bahwa sekolah penggerak bukanlah sekolah dengan sarana dan prasarana yang melebihi sekolah lainnya, melainkan sekolah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang telah lulus pelatihan sekolah penggerak dan memiliki tekad untuk melakukan perubahan pendidikan di sekolahnya. Dengan kata lain, sekolah penggerak merupakan sekolah yang memiliki semangat dalam bergerak untuk mencapai perubahan yang baik.

5. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar

Pawartani & Suciptaningsih (2024) Platform Merdeka Mengajar merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dengan memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Mengajar. Melalui Platform Merdeka Belajar, guru dapat mengakses inspirasi, referensi, menambah literasi, serta memahami lebih lanjut tentang penerapan Kurikulum Merdeka.

6. Pemantauan dan Umpan Balik

Pawartani & Suciptaningsih (2024) menyebutkan bahwa upaya pemantauan dan umpan balik yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dapat melalui observasi rutin, evaluasi hasil belajar, diskusi antar guru, serta memberikan evaluasi dan saran yang membangun kepada para guru.

7. Penelitian Tindakan Kelas

Pawartani & Suciptaningsih (2024) mengungkapkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami cara siswa belajar dan sejauh mana pembelajaran tersebut mempengaruhi perkembangan mereka. Melalui penelitian tindakan kelas ini, guru dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam metode pembelajaran yang diterapkan. Proses ini tidak hanya melibatkan pengamatan terhadap perilaku dan respons siswa, tetapi juga analisis mendalam mengenai efektivitas strategi pengajaran yang digunakan.

Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan sistem pembelajaran intrakurikuler yang bervariasi dengan adanya konten pembelajaran yang lebih optimal guna meningkatkan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan pendalaman konsep. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini pendidik memiliki keleluasaan dalam memilih perangkat ajar dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat lebih menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan minat siswa. Selain pelaksanaan pembelajaran yang lebih fleksibel dan mengutamakan pembelajaran yang bersifat interaktif, karakteristik pelaksanaan Kurikulum Merdeka lainnya menurut Riadi (2023) adalah dengan menyediakan perangkat pengajaran yang lebih banyak, seperti buku teks pelajaran, asesmen literasi dan numerasi, modul pengajaran, dan fasilitas pemanfaatan teknologi yang diberikan

oleh Kemendikbud berupa aplikasi dan *website* yang dapat digunakan oleh para guru untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini lebih berfokus kepada peningkatan keterampilan siswa sehingga dapat lebih siap untuk menghadapi perkembangan industri dikarenakan pelaksanaannya yang mengutamakan peningkatan keterampilan komunikasi, kerjasama, kepekaan terhadap teknologi, serta perangsang pemikiran kritis.

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka dalam Wahyudin et al. (2024) dilaksanakan berdasarkan kepada empat karakteristik dibawah ini:

1. Pemanfaatan asesmen di awal pertemuan, pada saat proses pembelajaran, serta pada akhir pertemuan.
2. Memanfaatkan pemahaman peserta didik untuk menyesuaikan metode pembelajaran.
3. Kemajuan proses belajar peserta didik menjadi prioritas dibandingkan lingkup dan kesempurnaan muatan kurikulum pembelajaran.
4. Mengacu pada refleksi kemajuan belajar peserta didik secara kolaboratif bersama dengan pendidik lain.

Selanjutnya, Wahyudin et al. (2024) dalam buku “Kajian Akademik Kurikulum Merdeka” juga mengungkapkan struktur Kurikulum Merdeka yang memuat hal sebagai berikut:

1. Intrakurikuler, berisikan kompetensi, muatan belajar, serta beban belajar.
2. Kokurikuler, merupakan kegiatan pendalaman materi intrakurikuler, sebagai contoh yaitu pelaksanaan proyek, studi tour, bakti sosial, research class, dan lain sebagainya.
3. Ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan diluar pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 3 Samarinda. Dengan fokus penelitian pada pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan, menggunakan purposive sampling dengan informan utama: Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan tiga guru (mewakili kelas X, XI, dan XII). Analisis data mengikuti teknik Saldana et al. (2014) yang mengorganisir data verbal menjadi deskripsi naratif. Penelitian ini memberikan wawasan faktual tentang persiapan guru menghadapi perubahan kurikulum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka oleh Pawartani & Suciptaningsih (2024) yang mencakup 7 (tujuh) model pengembangan. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif pelaksanaan pengembangan pendidik yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Samarinda:

1. Pelatihan dan *Workshop*

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa SMK Negeri 3 Samarinda mendapatkan bantuan sosialisasi pada awal pelaksanaan kurikulum merdeka, melalui postingan *Instagram* yang diunggah oleh Badan Guru Penggerak Kalimantan Timur di ketahui bahwa dilaksanakan bekerjasama dengan Sekolah SMK Negeri 3 Samarinda mengadakan Workshop Penyusunan Perangkat Ajar Tahun Ajaran 2023/2024. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwik Setiawati, M.Pd. menjadi narasumber dengan materi Kurikulum Merdeka dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Peserta dalam kegiatan Workshop adalah semua Guru yang ada di SMK Negeri 3 yang terdiri dari Guru Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan dan Bidang Perhotelan/Pariwisata, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di *Ball Room* Perhotelan SMK Negeri 3 Samarinda. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta Workshop memahami tentang Kurikulum Merdeka, teknis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pemanfaatan perangkat ajar PMM dalam pembelajaran secara mendalam sesuai dengan kebutuhan.

Selain workshop dalam penyusunan perangkat ajar, SMK Negeri 3 Samarinda juga menerima program pelatihan Sekolah SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Menurut Kemendikbud (2023) dalam Buku Saku SMK Pusat Keunggulan, program ini bertujuan untuk mengembangkan SMK dengan fokus pada keahlian, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja yang dimiliki. Program SMK Pusat Keunggulan (PK) berkontribusi pada perbaikan mutu pendidikan melalui pelaksanaan link and match dengan dunia industri, serta meningkatkan kompetensi pendidik, termasuk kepala sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Suherman et al. (2024) program SMK Pusat Keunggulan (PK) dilaksanakan melalui pelatihan atau diklat dalam bentuk *workshop* yang menyelaraskan proses belajar di kelas dengan kebutuhan dunia kerja. Program ini juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru agar sesuai dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi dunia kerja. program SMK Pusat Keunggulan (PK) ini juga menunjang peningkatan soft skill dan hard skill peserta didik agar dapat menghadapi tantangan dalam dunia kerja melalui pengembangan karakter seperti yang diterapkan pada Kurikulum Merdeka.

Di SMK Negeri 3 Samarinda, pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan (PK) dilakukan dalam 18 (delapan belas) sesi pelatihan selama enam bulan. Pelatihan ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik yang diselenggarakan secara *In House Training* (IHT), dengan fasilitas pembelajaran dan komunitas praktis antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan (PK) di SMK Negeri 3 Samarinda juga melibatkan diskusi antar guru untuk membahas kebutuhan pembelajaran siswa. Pelatihan SMK Pusat Keunggulan (PK) yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara daring maupun luring.

Pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan (PK), pada Buku Saku SMK Pusat Keunggulan, disebutkan pula dalam hal peningkatan kompetensi kepala sekolah dan para guru dilaksanakan melalui program reskilling dan upskilling. Menurut Kemendikbud (2020) *Upskilling* dan *Reskilling* merupakan inovasi untuk menggabungkan antara Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). *Upskilling* merupakan program peningkatan kompetensi guru, dan *Reskilling* merupakan upaya pelatihan terhadap keterampilan baru bagi para guru SMK. Berdasarkan hasil wawancara di SMK Negeri 3 Samarinda, pelaksanaan upskilling dan reskilling dilaksanakan melalui pelatihan dan pembelajaran baik secara online maupun yang dilaksanakan di pusat, serta pelaksanaan magang di DUDI. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Siagian (2023) yang mengatakan bahwa pelaksanaan *upskilling* dan *reskilling* dilaksanakan melalui diklat dan juga magang langsung di dunia usaha dan dunia industri oleh pendidik.

2. Pendampingan dan Mentoring

Berdasarkan dari hasil wawancara, diketahui bahwa SMK Negeri 3 Samarinda melalui SK Direktur Jendral Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 12/D/O/2022 ditunjuk menjadi salah satu Sekolah SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Pelaksanaan pendampingan dalam program SMK Pusat Keunggulan (PK) ini dilaksanakan oleh Pemerintah bagi Kepala Sekolah, Guru, serta Pengawas Sekolah. Adapun berdasarkan Buku Saku SMK Pusat Keunggulan, bentuk pendampingan yang diberikan berupa pendampingan konsultatif dan asimetris. Pendampingan konsultatif merupakan pendampingan yang memfokuskan pendampingan pada dialog, konsultasi, serta advokasi. Sehingga dalam pendampingan ini terdapat kegiatan diskusi serta pemberian masukan dan saran sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tercipta solusi yang relevan. Lalu, pendampingan asimetris merupakan bentuk pendampingan dimana pendamping menyesuaikan perlakuan, intervensi, serta strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta serta kapasitas tiap satuan pendidikan. Sehingga dengan kata lain, pendampingan ini tidak memberikan perlakuan yang sama atau asimetri, karena didasarkan pada

keberagaman kebutuhan dan karakteristik, serta tantangan dan potensi yang ada. Pendamping ini tentunya harus sudah melaksanakan pelatihan pendampingan SMK Pusat Keunggulan (PK) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan sesuai dengan petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

3. Kolaborasi dan Jaringan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SMK Negeri 3 Samarinda dari program SMK Pusat Keunggulan (PK) itu kemudian terdapat pelaksanaan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan (PK) guna mempererat mitra sekolah dengan dunia industri demi menciptakan kolaborasi yang kuat. Kemitraan yang baik ini kemudian juga merupakan tujuan implementasi kurikulum merdeka di SMK yaitu kesesuaian pembelajaran dengan dunia kerja. Selain kemitraan dengan DUDI yang baik, kompetensi guru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi tujuan dari pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan (PK).

Bentuk kolaborasi dan jaringan dengan mitra di SMK Negeri 3 Samarinda juga tercermin melalui *workshop* yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Samarinda. Pihak industri diundang sebagai guru tamu untuk mengisi di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan dari dunia kerja. Selain melalui bentuk kerjasama secara *workshop*, pihak industri juga melaksanakan suka rela dalam bentuk peningkatan pendidikan melalui program CSR Perusahaan. *Corporate Social Responsibility* atau yang dikenal juga dengan CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan. Di SMK Negeri 3 Samarinda pelaksanaan CSR salah satunya adalah dilaksanakan oleh *Hotel Midtown*. *Hotel Midtown* memiliki program CSR berupa pelatihan pendidikan dengan mengisi sebagai guru tamu di SMK Negeri 3 Samarinda dan memberikan pembelajaran terhadap pelaksanaan di dunia kerja.

4. Pemodelan Sekolah Penggerak

Sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan (PK) yang menjadi sekolah percontohan bagi SMK lainnya, yang berarti SMK PK akan diarahkan menjadi Sekolah Penggerak. Yang dimana, sekolah penggerak ini merupakan sekolah yang berperan sebagai rujukan serta memiliki semangat pengimbasan bagi kinerja SMK lainnya dengan pilar utamanya adalah Merdeka Belajar. Program SMK Pusat Keunggulan (PK) merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kompetensi keahlian guna mendukung daya saing di dunia industri. Program SMK PK didukung oleh kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, industri, serta dunia kerja, yang menjadikan SMK tersebut sebagai acuan yang berperan sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.

5. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar

Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui gawai android atau situs web. Fungsinya adalah menyediakan beragam perangkat ajar yang diperlukan oleh siswa dan guru untuk mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Setiariny & Sanmarwi (2024) mengatakan bahwa pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dapat membantu guru dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang lebih kreatif serta relevan dengan kebutuhan siswa. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dikatakan mampu meningkatkan kepercayaan diri guru karena dalam platform tersebut terdapat materi-materi dasar yang dapat diterapkan pada materi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa guru di SMK Negeri 3 Samarinda memanfaatkan platform merdeka mengajar untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan upskilling, serta bentuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil dari rapor pendidikan yang berisikan hasil pembelajaran selama satu tahun, saran perbaikan, serta rekomendasi perbaikan pembelajaran.

6. Pemantauan dan Umpan Balik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Samarinda diketahui dilaksanakan pemantauan selama proses pembelajaran berlangsung secara bertahap selama persemester. SMK Negeri 3 Samarinda juga menampung umpan balik dari para siswa terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga diketahui SMK Negeri 3 Samarinda memberikan form kepuasan pelayanan pembelajaran di kelas kepada siswa baik dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru maupun fasilitas yang disediakan. Selain menerima umpan balik dari pihak internal, SMK Negeri 3 Samarinda sebagai satuan pendidikan kejuruan, pelaksanaan penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja tentu tidak terlewatkan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak industri yang merupakan guru tamu berperan dalam mendiskusikan kebutuhan industri dan menilai apakah sekolah sudah sesuai dengan keperluan industri. Guru tamu memberikan pelajaran dan melihat perkembangan siswa, serta memberikan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi di SMK Negeri 3 Samarinda tidak hanya menjadi langkah akhir dalam pengembangan sumber daya manusia pendidik, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur dan menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

7. Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas adalah pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis untuk pengembangan profesional guru. Di SMK Negeri 3 Samarinda dilaksanakan melalui asesmen dan pemanfaatan sumber belajar adalah praktik yang lebih langsung dan aplikatif dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Berdasarkan Kurikulum Merdeka yang diterapkan, SMK Negeri 3

Samarinda memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses, serta akhir untuk memahami kebutuhan pembelajaran siswa serta untuk mengidentifikasi proses belajar yang telah dilaksanakan kepada siswa. Di SMK Negeri 3 Samarinda diketahui bahwa pada asesmen awal pertemuan sangat penting untuk dilaksanakan terutama bagi kelas XII (dua belas) yang dimana kelas XII (dua belas) ini menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester awal kelas XII (dua belas), yang dimana dapat berpotensi terhadap siswa yang menjadi kaku dengan pembelajaran teori di kelas. Asesmen ini penting untuk memberikan gambaran bagaimana kompetensi awal yang dimiliki siswa, sehingga kemudian dapat dirancang bagaimana pembelajaran harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

Hasil akhir siswa ini yang biasa kita ketahui terdapat pada rapor siswa dan juga terdapat pada rapor pendidikan sekolah. Melalui rapor pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, pihak sekolah tidak hanya dapat memahami sejauh mana keberhasilan pembelajaran terlaksana, namun juga pada rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang dapat membantu perbaikan pembelajaran yang masih kurang. Rekomendasi ini dapat diperoleh dengan lembar Rekomendasi Keseluruhan dan Rekomendasi Prioritas. Namun, rekomendasi dari Kemendikbudristek hanya dapat didapatkan oleh sekolah yang telah melaksanakan Asesmen Nasional atau Survei Lingkungan Belajar.

Sebagai salah satu aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia dalam prosesnya tentu menghadapi beberapa faktor penghambat yang menjadi penghalang dalam pencapaian tujuan dalam program pengembangan di sekolah tersebut. Adapun faktor yang menjadi penghambat guru dalam mengikuti pengembangan kompetensi di SMK Negeri 3 Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Jadwal pelatihan yang mengganggu proses pembelajaran

Dari hasil wawancara juga ditemukan dalam program SMK PK yang padat dimana dilaksanakan dalam 18 (delapan belas) sesi pembelajaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, menjadikan proses pembelajaran di kelas menjadi terganggu. Hal ini dapat memicu rasa frustrasi dan tertekan bagi guru dimana mereka harus melaksanakan tuntutan untuk memenuhi jadwal mengajar, sehingga dapat berakhir untuk mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang mana juga penting dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas.

2. Efisiensi biaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Melansir dari BBC News, Kemendikdasmen pada awalnya mengantongi anggaran sebesar Rp. 33,5

triliun, namun berdasarkan kebijakan Inpres tersebut, terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 8 triliun, sehingga Kemendikdasmen hanya mengelola sebesar Rp. 25,5 triliun. Dampak dari pemotongan dana ini juga berakibat pada proses pengembangan sumber daya manusia pendidik. Pasalnya, seperti yang dilaporkan pada Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK/02/2025, pemangkasan dana termasuk kepada:

- a. Pemangkasan dana rapat, seminar, dan sejenisnya sebesar 45%.
 - b. Diklat dan bimtek sebesar 29%.
3. Kewajiban sekolah dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan kompetensi guru

Seperti yang ditemukan pada wawancara yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Samarinda, perubahan kebijakan yang mengharuskan guru untuk membayar biaya pelatihan pada tahun 2025, setelah sebelumnya program ini dilaksanakan secara gratis, menimbulkan kekhawatiran. Banyak guru yang merasa terbebani oleh biaya yang harus dikeluarkan, termasuk biaya tiket perjalanan, yang dapat mengurangi minat mereka untuk mengikuti program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan dukungan finansial dalam pelaksanaan program pelatihan sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif guru dalam *upskilling* dan *reskilling*, demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 3 Samarinda dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK), meliputi pelatihan, workshop dengan Balai Guru Penggerak, *upskilling*, *reskilling*, serta pendampingan konsultatif dan asimetris. Kolaborasi melibatkan komunitas belajar, dunia usaha dan industri (DUDI), serta pemerintah, dengan sekolah sebagai agen penggerak melalui pemodelan Sekolah Penggerak. Platform Merdeka Mengajar (PMM) digunakan untuk akses informasi pelatihan, rekomendasi perbaikan, dan video inovatif.

Pemahaman kebutuhan siswa diperoleh melalui pemantauan umpan balik dari guru, industri, dan siswa, serta penelitian tindakan kelas dengan asesmen bertahap untuk menentukan metode pembelajaran relevan. Namun, penghambat utama adalah tabrakan jadwal pelatihan dengan mengajar, pemangkasan anggaran pemerintah, dan kewajiban alokasi dana sekolah sendiri. Perbaikan aspek ini diperlukan untuk optimalisasi program.

Saran

1. Dapat dilaksanakan pengaturan jadwal belajar mengajar yang lebih fleksibel untuk menghindari tabrakan dengan pelatihan dan penyediaan guru pengganti

- dari internal sekolah, guru honorer, atau mahasiswa praktik untuk mengisi kelas saat guru mengikuti pelatihan.
2. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan untuk meningkatkan implementasi Kurikulum Merdeka dan mengukur manfaatnya bagi guru.
 3. Program pelatihan dapat dialihkan pelatihan ke platform online untuk mengurangi biaya akomodasi dan mempertahankan motivasi guru di tengah pemangkasan anggaran pemerintah.

Daftar Pustaka

- Alfath, A., Azizah, F. N., & Setiabudi, D. I. (2022). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>
- Effendi, M., & Sulistyorini. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Citra Lembaga di Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.40>
- Indarti, A. (2023). Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Metode Forum Group Discussion Smp Negeri 3 Cawas Kabupaten Klaten Di Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(1), 93–107. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1.485>
- Kemendikbud. (2020). *Program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berstandar industri tahun 2020*. 2, 2–5. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Kemendikbud. (2023). SMK Pusat Keunggulan. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1. <http://smkpk.ditpsmk.net/>
- Kemendikbudristek. (2021). *Program Sekolah Penggerak*. <https://sekolah.penggerak.kemendikdasmen.go.id/>
- Mujayanah, N. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Miftah Sindajaya Brebes. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 1–193. <http://eprints.walisongo.ac.id/4664/1/103111058.pdf>
- Norwahliyah, A. (2024). *Puji Minta Pemkot Serius Perhatikan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Samarinda*. *Pusaranmedia.Com*. <https://pusaranmedia.com/read/26889/puji-minta-pemkot-serius-perhatikan-peningkatan-kualitas-pendidikan-di-samarinda>
- Pawartani, T., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Pengembangan Kompetensi Guru

- untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2182–2191. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3478>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., & Hernawan, A. H. (2022). *Jurnal basicedu*. 6(4), 6313–6319.
- Saldana, J., Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE PUBLICATIONS, INC.
- Santika, N. W. R. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Karakter. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Karakter*, 04(01), 9.
- Setiariny, E., & Sanmarwi, S. (2024). Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru Di Provinsi Banten. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 21(2), 72–77. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v21i2.148>
- Seto, A. A., Febrian, W. D., Mon, M. D., Senoaji, & Kusumawardhani, N. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Suparyanto dan Rosad (2015: Vol. CV.EUREKA*.
- Siagian, M. (2023). Efektivitas Program Upskilling dan Reskilling bagi Peningkatan Kompetensi Guru SMK di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i1.12753>
- Soro, S. H., Rifandi, A., & Sofayantina, Y. (2024). *Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus Penggunaan Anggaran di SMP Negeri 36 Kota Bandung)*. 5, 2441–2448.
- Suherman, M., Ma, A., & Nurani, S. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) Melalui Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) di SMKN PP*. 5.
- Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, M. A., Sudiapermana, E., LeliAlhapip, M., Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, L. S., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). Kajian Akademik Kurikulum Merdeka. *Kemendikbud*, 1–143.